



Peran Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur

Tsabitah Mariyah Dwiyanti¹, Indira Arundinasari²

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

¹21041010092@student.upnjatim.ac.id

²Indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan, namun penelitian yang mengangkat isu kemiskinan ekstrem masih terbatas. Khususnya, menjelaskan peran sub substansi sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah kasus kemiskinan tertinggi di Indonesia yang mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mencapai kemiskinan ekstrem *zero* persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Biro Kesejahteraan Rakyat Prov. Jawa Timur pada sub substansi sosial dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, *forum group discussion*, dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa Biro Kesra Provinsi Jawa Timur sub substansi sosial menjalankan strategi menurunkan beban pengeluaran, yang diwujudkan melalui bantuan sosial kepada eks pengungsi konflik Sampang Jemundo. Selain itu, juga ikut memfasilitasi pelaksanaan tugas bidang sosial, melalui *forum group discussion* dengan fokus pada strategi penurunan beban pengeluaran yang mendukung pada kolaborasi antar sektor pemerintah dan non pemerintah. Untuk keberlanjutan penelitian ini, maka dapat mempertimbangkan peran sektor lain sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

Kata Kunci: Kebijakan, Kemiskinan, Peran, Percepatan, Strategi.

Abstract

Much research has been conducted on poverty, however, there is still limited research that addresses the issue of extreme poverty, in particular, explaining the role of social substance in the People's Welfare Bureau of East Java Province. As one of the East Java Provincial Governments, with the highest number of poverty cases in Indonesia. Referring to the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 4 of 2022 concerning the elimination of extreme poverty, the East Java Provincial Government is committed to achieving zero percent extreme poverty by 2024. Therefore, this research aims to analyze the role of the Provincial People's Welfare Bureau. East Java on social substance in an effort to accelerate the resolution of extreme poverty in East Java. This research uses a descriptive

qualitative approach. Data was collected through interviews, observation, group discussion forums, and literature study. The results show that the East Java Province Social Welfare Bureau is implementing a strategy to reduce the burden of expenditure, which is realized through social assistance to perpetrators of the Sampang Jemundo conflict. Apart from that, it also facilitates the implementation of social sector tasks, through group discussion forums with a focus on strategies for reducing expenditure burdens that support collaboration between government and non-government sectors. If you want this research, you can consider the role of other sectors as an effort to accelerate the resolution of extreme poverty in East Java.

Keywords: Acceleration, Policy, Poverty, Role, Strategy.

1. Pendahuluan

Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari pemerintah Jawa Timur yang dimana memiliki tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Biro Kesejahteraan (Biro Kesra) Jawa Timur membantu pemerintah dan kesejahteraan rakyat dalam koordinasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Dalam bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar terbagi menjadi tiga sub subansi yaitu sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sub subansi sosial berperan dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, dengan mengadopsi strategi dari Bappeda Jawa Timur sebagai leading sektor dan ketua tim percepatan kemiskinan yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan yang diwujudkan melalui bantuan sosial. Satu-satunya bantuan sosial yang diwujudkan oleh sub subansi sosial Biro Kesra Jawa Timur yaitu bantuan sosial eks pengungsi konflik Sampang di Jemundo.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur selaku penunjang pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pemetaan rencana program yang diharapkan membantu stakeholder lainnya untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara efektif dan tepat sasaran (Zulkifli & Mega Putri, 2023). Strategi tersebut yakni menurunkan beban pengeluaran. Meningkatkan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Menurut BPS yang telah diolah, persentase penduduk miskin ekstrem 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2022 sebesar 1,80% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 724.330 jiwa. Hal tersebut distribusi rumah tangga miskin ekstrem nyaris separuh dari total rumah tangga miskin di Jawa Timur (Fatikhurizqi & Kurniawan, 2022). Provinsi Jawa Timur termasuk dalam 35 kabupaten prioritas kemiskinan ekstrem yang dimana Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil analisis CHAID bahwasannya rasio ketergantungan rumah tangga yang cukup tinggi yakni berkisar antara 0,5-10 dengan ke rumah tangga yang berstatus tidak bekerja atau bekerja di sektor pertanian (Taufiq, 2022). Kondisi di sektor pertanian relatif tidak stabil di bandingkan dengan aktivitas di sektor industri dan jasa di perkotaan. Faktor-faktor seperti gagal pan dan penurunan harga produk pertanian, para petani dapat dengan mudah jatuh ke dalam kemiskinan. Maka dari itu pekerjaan kepala rumah tangga di sektor pertanian mempunyai pengaruh positif terhadap status kemiskinan ekstrem.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditujukan salah satunya kepada para gubernur untuk

mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sebagaimana peran pemerintah daerah sebagai koordinator untuk mengambil dan menetapkan kebijakan ataupun strategi-strategi untuk daerahnya (Fathurohman et al., 2021). Pada penelitian terdahulu oleh Ade Taufan (2022) mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan melalui peran pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial secara responsif. Dalam hal ini, Ade Taufan (2022) juga menyebutkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan BLT dapat meringankan beban hidup keluarga miskin (Taufan, 2022). Sejalan dengan hal itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andre Agasi (2023) memaparkan bahwa peran pemerintah dalam berinovasi untuk menekan kemiskinan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agasi, 2023). Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia berperan untuk mengambil langkah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Secara global garis kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia ialah masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita perhari dibawah US \$ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). September 2022 *world bank* memperbarui bahwasannya garis kemiskinan ekstrem baru ditetapkan sebesar US \$2.15 berdasarkan pada nilai harga pada tahun 2017 (the world bank, 2022).

Fenomena Jumlah Kemiskinan Provinsi Jawa Timur, berada pada peringkat pertama sebanyak 4.188.810 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) & Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. namun, kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan, persentase penduduk miskin Jawa Timur September 2022 - Maret 2023 turun sebesar 0,14%, bahkan dalam kurun 2 tahun terakhir Maret 2021- Maret 2023 Jawa Timur berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi sebanyak 383.920 jiwa. Meskipun kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan, pemerintah tetap berupaya untuk menurunkan kemiskinan lebih progresif lagi karena masih terdapat permasalahan dan isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Permasalahan tersebut seperti jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, tingginya kemiskinan di pedesaan Jawa Timur, program penanggulangan kemiskinan belum terkoordinasi secara optimal, minimnya keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan, kebijakan yang mendukung penanggulangan kemiskinan belum tersinkronisasi, dan permasalahan lainnya.

Permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional, muncul akibat tidak berfungsinya sumber daya manusia dengan baik, termasuk akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan (Adawiyah, 2020). Ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk sehari-hari akan berdampak pada kelaparan dan kekurangan gizi yang berujung pada tingginya angka stunting pada anak yang mengakibatkan penurunan kognitif dan lebih rentan terhadap penyakit. Mengingat bahwa letak Wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sangat luas yang terdiri dari 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, 8.494 desa/kelurahan, dengan total jumlah penduduk sebanyak 40,67 juta jiwa (BPS Provinsi Jawa Timur, 2023). Maka perlunya optimalisasi upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur.

Selain itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh dengan tingkat kemiskinan. Apabila pendidikan mengalami kenaikan maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan, karena tingginya kualitas pendidikan akan berdampak pada hasil atau *output* yang optimal sehingga memperoleh pendapatan atau *income* yang maksimal juga, begitupun sebaliknya. Selain itu, kesehatan merupakan motor penggerak dalam meningkatkan produktivitas, apabila produktivitas meningkat maka individu akan memperoleh pendapatan atau *income* dan

tidak terjebak dalam jurang kemiskinan (Nila Isroviyah, 2020). Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka akan menghambat pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sehingga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya yaitu melalui pengentasan kemiskinan yang melibatkan serangkaian upaya dan kebijakan. Hasil kajian TNP2K (2021) dalam penelitian La Ode & Neli Agustina (2023) menyatakan bahwa pendidikan yang rendah, tidak memiliki akses pekerjaan yang layak, rendahnya kualitas kesehatan merupakan karakteristik penduduk miskin ekstrem. Dalam hal ini, La Ode & Neli Agustina (2023) menyatakan bahwa untuk pengentasan kemiskinan ekstrem harus berorientasi pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pada pengembangan wilayah (Fauzan & Agustina, 2023). Sejalan dengan World Bank (2019), bahwa serangkaian upaya untuk berinvestasi kepada manusia dengan memberikan nutrisi, kesehatan, dan kualitas pendidikan akan membantu untuk membangun sumber daya manusia merupakan kunci penting untuk pengentasan kemiskinan (the world bank, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa inovasi pemerintah dalam upaya menekan kemiskinan yang berorientasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan namun, masih terbatasnya penelitian yang mengangkat isu kemiskinan esktrm khususnya menjelaskan peran sub subtansi sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Peneliti menunjukkan fenomerna permasalahan dengan dua poin utama, pertama strategi dan kebijakan dalam upaya menangani kemiskinan. Kedua, mengkaji peran sus subtansi sosial di Biro Kesjahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dalam menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. urgensi dari pemilihan topik kemiskinan ekstrem ini ialah tercapainya kemiskinan ekstrem *zero* persen pada tahun 2024, hal ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan dalam strategi penanganan kemiskinan serta memberikan informasi kepada praktisi sebagai landasan untuk mengambil keputusan terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur yang berkelanjutan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data primer penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan forum. Observasi dilakukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur selama 4 bulan. Wawancara dilakukan dengan salah satu staf di sub subtansi sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Forum diadakan oleh Sub Subtansi Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai fasilitator atas rencana aksi penanganan kemiskinan di Jawa Timur yang dihadiri oleh narasumber dari perwakilan Bappeda dan akademisi serta audiens yang hadir ialah para stakeholder pemangku kepentingan se-Jawa Timur seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi literature yang relevan terkait dengan penanganan kemiskinan. Lokus penelitian ini yaitu di Biro Kesra Provinsi Jawa Timur pada bagian pelayanan dasar sub bagian sosial. Fokus penelitian ini adalah peran Biro Kesra Provinsi Jawa Timur pada sub subtansi sosial dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur. Penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan pendekatan purposive, informan yang dipilih ialah yang memenuhi kriteria dan pernah berperan dalam proses penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur oleh Biro Kesra Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dianalisis dengan model Miles dan Huberman secara bertahap dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 0%.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur

Suatu permasalahan dapat dipecahkan dengan menerapkan strategi yang terarah dan terukur untuk mencapai tujuan tertentu. Sinergi antara perencanaan strategi dan kebijakan yang bijaksana akan menciptakan landasan yang kokoh untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Selain itu, akan menghasilkan dampak yang lebih besar dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kebijakan dan strategi dengan mengadopsi pendekatan berbasis data dapat menciptakan kebijakan dan strategi yang lebih kontekstual dan tepat sasaran.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kemiskinan tertinggi pada maret 2023. Kondisi tersebut menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Sebagaimana dengan visi provinsi Jawa Timur 2019-2024 yakni terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Dengan itu, pemerintah melakukan upaya-upaya strategis untuk mencapai kemiskinan ekstrem zero persen pada tahun 2024.

Adapula salah satu program dari tujuh program prioritas Provinsi Jawa Timur yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan. Dengan hal tersebut bahwasanya pengentasan kemiskinan menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bertindak. Tentunya untuk menjalankan program atau kebijakan sebelumnya terdapat rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jatim 2019-2024, bahwasannya terdapat beberapa strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, antara lain sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, antar sektor, serta lokasi dan sasaran tertentu. Berikutnya, mengoptimalkan peran UMKM dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama, di wilayah tertinggal, terluar, terdalam atau 3T. kemudian, mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Selain itu, mengembangkan dan memperkuat kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai bagian dari upaya penanganan PMKS. Kemudian, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Selanjutnya, mendukung sistem jaminan sosial melalui PKH Plus dan program jaminan sosial lainnya.

Selain itu, program Nawa Bhati satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat 9 bhakti dan salah satu diantaranya terkait dengan pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial yaitu bhakti 1 Jatim Sejahtera. Untuk menangani kemiskinan ekstrem juga perlu adanya strategi. Berikut tiga strategi untuk menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, yang pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran. Menurunkan beban pengeluaran dapat dengan tiga program seperti perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan, hal ini dapat melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, hal ini dapat melalui dengan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan sosial) dan peningkatan konektivitas antar wilayah.

b. Peran Biro Kesejahteraan Rakyat Dalam Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur

Berdasarkan uraian diatas, dari tiga strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dijelaskan bahwasannya Biro Kesra Provinsi Jawa Timur di sub substansi sosial ikut berperan dalam strategi yang pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran. Dalam rangka menurunkan beban pengeluaran terdapat tiga bentuk seperti perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial.

Bentuk-bentuk bantuan yang akan diberikan guna mengurangi beban pengeluaran masyarakat maka dari itu, dibentuklah program-program untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Berikut akan dijelaskan program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur pada strategi menurunkan beban pengeluaran.

Program pertama yaitu PKH+ atau Program Keluarga Harapan Plus, program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi KPM atau lanjut usia melalui pemanfaatan bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non tunai. Program ini memiliki peta sasaran penerima manfaat pada 25 kabupaten dengan sasaran pada tahun 2019-2022 sebanyak 50.000 KPM pertahun dan pada tahun 2023 sebanyak 55.000 KPM. Berdasarkan sasaran penerima program PKH+ di tahun 2022 terdapat 23.492 Jiwa atau sebesar 48,89% yang masuk di data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Besar bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp 2.000.000 per tahun dengan pencairan dalam 4 tahap sebesar Rp 500.000/KPM. (Suryahadi, 2019) menemukan bahwa PKH telah berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Program kedua yaitu bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (ASPD), program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang berusia 6 bulan sampai dengan kurang dari 60 tahun. Besar bantuan yang diberikan yaitu Rp 3.600.000 per tahun yang disalurkan setiap 3 bulan sekali sebesar Rp 900.000. Berdasarkan sasaran penerima program ASPD di tahun 2022 terdapat 1.437 jiwa atau 39,59% yang masuk di data P3KE. Pada tahun 2023 program ini memiliki sasaran 55.000 .KPM.

Program ketiga yaitu Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), program ini bertujuan untuk mensubsidi pendidikan sebagai pengganti SPP bagi siswa SMA/SMK dan PK-PLK Negeri dan Swasta. Pada tahun 2023 program ini memiliki sasaran 1.285.508 Siswa. Program Keempat yaitu Kontribusi PBI JKN, program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu. Program ini memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan masuk kategori peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Program kelima yaitu BIAKES MASKIN, program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan apapun diluar layanan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2023 program ini menargetkan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki PBI JKN sebanyak 3.698 jiwa. Program yang terakhir yaitu Rumah sakit Terapung Bahari Husada, program ini bertujuan untuk memenuhi redistribusi fasilitas kesehatan. Pada tahun 2023 program ini memiliki sasaran untuk pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah 3T (terpencil, tertinggal, terdepan), perbatasan dan kepulauan.

Dari program-program yang ada di atas, Biro Kesra Provinsi Jawa Timur dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berperan sebagai fasilitator. Biro Kesra Provinsi Jawa Timur yang sebagai fasilitator, menyediakan atau memfasilitasi berupa bantuan sosial. Bentuk bantuan sosial yang diberikan sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur salah satunya yakni bantuan sosial pasca konflik Sampang. Singkatnya konflik sampang yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan pandangan yang dianggap menyesatkan dan meresahkan masyarakat sampang sehingga berujung pada terusirnya beberapa warga sampang dari wilayahnya. Warga yang terusir tersebut ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga dipindahkan di Rusunawa Jemundo Kab. Sidoarjo.

Dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber dari Sub Subtansi Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi. Jawa Timur, bahwasannya pengungsi konflik Sampang yang ada di Jemundo termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem karena akibat dari konflik tersebut mereka kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal. Selain itu, pengungsi konflik sampang di Jemundo merupakan pendatang baru yang diusir akibat konflik yang terjadi sehingga mereka dianggap sebagai minoritas dan kurang mendapatkan hak sosial dalam masyarakat. Hal tersebut berakibat pada pendapatan yang dialami oleh pengungsi konflik Sampang di Jemundo menurun bahkan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali sementara pengeluaran yang dikeluarkan tetap terjadi sehingga mereka para pengungsi akibat konflik Sampang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.



Gambar 1. Pemberian Bantuan Sosial Konflik Sampang

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dengan kondisi tersebut dan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 44 Tahun 2021 maka Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur berperan memberi bantuan sosial berupa jaminan hidup dalam bentuk uang tunai. Bantuan tersebut diberikan per kepala atas pengungsi konflik Sampang di Jemundo, total pengungsi akibat konflik Sampang di Jemundo sebanyak 274 jiwa dengan 81 Kartu Keluarga (KK).

c. Kolaborasi dan Sinergitas Dalam Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur

Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi maka diperlukan adanya kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) atau stakeholder terkait pelaksanaan program-program yang akan

dilaksanakan (Santoso et al., 2023). Program-program yang dilaksanakan secara terintegritas antar stakeholder cenderung lebih termotivasi untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Dukungan-dukungan tersebut dapat saling berintegritas dalam mengatasi hambatan yang muncul ketika menangani permasalahan.

Dalam memperkuat upaya menangani kemiskinan ekstrem zero persen pada tahun 2024 maka dari itu, diperlukannya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Rangkaian kebijakan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kebijakan peningkatan pendapatan, penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau bahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus ditajamkan lagi untuk mencapai ketepatan sasaran dari program-program yang di berlakukan (Taufiq, 2022). Perlunya kolaborasi dan sinergitas antara pihak pemerintah maupun non pemerintah, pihak-pihak pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, serta pemerintah desa. Sedangkan pihak non pemerintah yaitu CSR atau corporate sosial responsibility, lembaga zakat, serta masyarakat dan lembaga sosial lainnya atau filantropi (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Dengan adanya kolaborasi dalam menangani kemiskinan dapat mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan / kemiskinan ekstrem dengan lembaga non pemerintah atau masyarakat lainnya. Hal ini dapat mendapatkan atau memanfaatkan data kemiskinan atau P3KE yang dimiliki oleh sekretariat TKPK Prov. Jatim sebagai data sasaran program, data tersebut yang telah dibantu dapat dibagikan untuk sinergitas program. Selain itu, adanya kolaborasi dapat memperluas *coverage* program penanggulangan kemiskinan dan menghindari adanya tumpang tindih bantuan yang diberikan untuk keluarga penerima manfaat. Kolaborasi ini juga bermanfaat untuk saling berbagi tentang program yang dilaksanakan selama ini atau sebagai bahan evaluasi termasuk kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dilaksanakan. Adanya kolaborasi penanggulangan kemiskinan ini juga dapat membantu tercapainya target persentase penduduk miskin ekstrem Jawa Timur 0% pada tahun 2024.



Gambar 2. Forum Group Discussion Penanganan Kemiskinan Di Jawa Timur

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Maka dari itu, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari lembaga pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut berperan dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024. Peran dari biro kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Timur ialah sebagai fasilitator untuk menyediakan tempat serta menghubungi narasumber dan audiens untuk dapat menyalurkan informasi secara efektif. Pada tanggal 10 Oktober 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur mengadakan sebuah *Forum Grup Discussion* (FGD)

yang mendatangkan narasumber akademisi dari Universitas Airlangga dan Kabid PPM Bappeda Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh 38 kabupaten / kota se Jawa Timur. FGD tersebut membahas tentang rencana aksi penanganan kemiskinan di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Pelayanan Dasar Sub Bagian Sosial, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, bahwasannya pada tahun 2024 ada program yang saling kolaborasi antar sektor salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. Program tersebut terdapat beberapa OPD yang saling kolaborasi seperti Dinas Sosial memberi bantuan sosial kepada keluarga rentan. Setelah pemberian bantuan sosial langkah berikutnya ke titik kedua yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat yang dimana hal itu terdapat OPD lain yang ikut berperan didalamnya seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bentuk kolaborasi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur juga dapat berbentuk workshop, workshop dilaksanakan dengan melibatkan pihak swasta dengan tujuan untuk memastikan keterlibatan pihak swasta dalam berkolaborasi intervensi program pengentasan kemiskinan, menyepakati mekanisme koordinasi kolaboratif dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan pemberian akses pemanfaatan P3KE oleh sektor swasta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dalam workshop ini juga di sosialisasikan penggunaan Aplikasi Sintagelis dan pemberian akses aplikasi kepada Lembaga Masyarakat Filantropi. Penggunaan Aplikasi Sintagelis atau Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dapat mempermudah perangkat daerah dalam menentukan calon penerima manfaat serta dapat meminimalisir kesalahan inklusi dan eksklusi penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwasanya dengan adanya teknologi digital dapat mempermudah dalam pencatatan dan tersistem dengan baik sehingga penggabungan inovasi digital teknologi dengan program-program penghapusan kemiskinan dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan *sustainable* (Okuputra & Nasikh, 2022).

4. Kesimpulan

Pada penelitian ini, peran Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur sub substansi sosial terhadap bantuan sosial kepada eks pengungsi konflik Sampang di Jemundo, menunjukkan bahwa bantuan sosial mampu menurunkan beban pengeluaran. Bantuan sosial yang diberikan berupa uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan makan, minum dan kebutuhan lainnya seperti susu, peralatan mandi, kebutuhan wanita, dll. Namun, bantuan sosial kepada eks pengungsi konflik sampang di Jemundo ini terakhir diberikan pada bulan Oktober 2023. Selain itu, peran Biro Kesra Provinsi Jawa Timur sub substansi sosial memfasilitasi dalam upaya percepatan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yaitu dengan dilaksanakan *Forum Group Discussion* yang berfokus pada strategi penurunan beban pengeluaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya inovasi terhadap penanganan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi multi sektor yaitu Program Keluarga Harapan Plus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Biro Kesra Provinsi Jawa Timur Sub Subtansi Sosial dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur hanya pada satu fokus strategi saja.

Melalui simpulan diatas, pemberian bantuan sosial oleh Biro Kesra Provinsi Jawa Timur khususnya sub substansi sosial sangat direkomendasikan. Namun, dalam konteks upaya percepatan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur perlu adanya dorongan dari berbagai sektor atau konvergensi antara sektor pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengkaji capaian kinerja penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem juga perlu dilakukan. Penelitian tersebut akan dapat memberikan informasi mengenai penilaian sejauh mana program

penanggulangan kemiskinan mencapai tujuan, dengan hal itu membantu para pihak berkepentingan untuk membuat keputusan dalam perbaikan program atau perencanaan strategi yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan_Dan_Penyebabnya. 1*(April), 43–50.
- Agasi, A. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengetasan Kemiskinan di Kota Medan. *Seminar Nasional Lppm Ummat*, 2(April), 247–252.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). *WILAYAH ADMINISTRATIF - Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018–2022*. <https://jatim.bps.go.id/stactable/2023/04/13/2676/jumlah-kecamatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2018-2022.html>.
- Fathurohman, M., Dayat, U., & Ramdani, R. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5919623>.
- Fatikhurriq, A., & Kurniawan, B. D. (2022). Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020 (The Role of Social Assistance in Alleviating Extreme Poverty in East Java in 2020). *Seminar Nasional Dan Official Statistics, 2020*, 1027–1036.
- Fauzan, L. O., & Agustina, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Kemiskinan Ekstrem Rumah Tangga di Provinsi Maluku Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021*, 343–352. <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/1639%0Ahttps://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/download/1639/526>.
- Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>.
- Nila Isroviyah. (2020). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Penelitian*, 1–23.
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *Inovasi*, 18(1), 159–166. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>.
- Santoso, E. B., Vely, S., Siswanto, K., & Setyaningsih, Y. (2023). Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Integrasi Program Antar OPD. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 113–129.
- Suryahadi, A. (2019). Dampak Program Bantuan Tunai terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan serta Respon Perilaku Penerima. *The Smeru Research Institute*.
- Taufan, A. (2022). *Peran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik Pada Masa Pandemi Tahun 2022*. 1(10), 2575–2584. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/2587>.
- Taufiq, N. (2022). Penciri Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem. *Seminar Nasional Official Statistics, 2022*(1), 895–904. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1258>.
- the world bank. (2019). *The Human Capital Project: Frequently Asked Questions*. Website the World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions>.
- the world bank. (2022). *Fact Sheet: An Adjustment to Global Poverty Lines*. Worldbank.Org. <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to>

global-poverty-lines#3.
Zulkifli, & Mega Putri. (2023). Peranan Bappeda Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Simeulue. *Embiss*, 3(3), 287–291.
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/228>.